

PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DI BANK SYARIAH

Dwi Sudaryati

Fakultas Ekonomi UPN "Veteran" Yogyakarta e-mail: sudaryati_dwi@yahoo.com

Yunita Eskadewi

Alumni Fakultas Ekonomi UNDIP e-mail: nietha_36@yahoo.com

ABSTRACT

The objective of this paper is to observe the influence of corporate governance towards the disclosure level of corporate social responsibility in Syariah Bank. Syariah Accounting as one of Alternative Accounting Science progressively shows growth with excitement latterly. Understanding about Syariah Accounting concept and its applying become an important matter remember fast progressively its growth Syariah Institutions in the world. The lifting of Corporate Governance and the disclosure of Corporate Social Responsibility are represent one of reaction to issues about both the things in the world of Accountancy. Besides that, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility (CSR) are represent two matter which is in line with Islam values so that need to be done a empirical study about applying both the things in Syariah Institution, specially in Syariah Banking. The conclusion of this paper is Islamic Governance give the influence to the disclosure level of Corporate Social Responsibility that presented by Syariah Bank in its Annual Financial Statement.

Keywords: Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Syariah Bank.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut sebuah kajian yang diselenggarakan oleh Bank Dunia, lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah Corporate Governance merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (The World Bank, 1998, dalam Djalil, 2001: 3). Rendahnya tingkat penerapan Corporate Governance ini terkait langsung dengan tingkat transparency dalam suatu lingkungan bisnis (Djalil, 2001: 3-4) Terkait dengan hal ini, Islam menawarkan sebuah aturan yang komprehensif mengenai transparency dan pertanggungjawaban dari sebuah entitas yang

merupakan bagian tak terpisahkan dari social community, dimana sebuah entitas tidak hanya dituntut untuk melakukan pertanggungjawaban kepada shareholder (pemegang saham), pemerintah, kreditor dan masyarakat saja tetapi yang lebih utama adalah adanya sebuah kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Bank Syariah sebagai sebuah entitas bisnis yang berkomitmen untuk menjalankan segala transaksi bisnisnya sesuai dengan nilai-nilai syariah seharusnya mampu mengaplikasikan pertanggungjawaban secara menyeluruh ini. Selain itu Bank Syariah sebagai sebuah entitas harus mengedepankan adanya keterbukaan, kejujuran, keadilan dan kewajaran.

Kebijakan atau hukum syariah yang menjadi landasan usaha Bank Syariah sesungguhnya juga mengedepankan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan maupun kewajaran, yang merupakan prinsip-prinsip utama dari Tata Kelola Perusahaan (untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut Corporate Governance). Dengan demikian, praktik Corporate Governance dapat dikatakan telah menyatu dengan keberadaan Bank Syariah sejak awal berdirinya, sementara penerapan Corporate Governance sebagai suatu kebijakan formal terus diupayakan dan ditingkatkan terutama dalam tahuntahun terakhir (Annual Report BMI, 2004).

Peran sosial Bank Syariah dan tuntutan terhadap pertanggungjawaban menyeluruh kepada Allah, manusia dan alam semesta ini merupakan pentingnya Pengungkapan Pertanggungjawaban Sosial Perusahaan (selanjutnya dalam penelitian ini disebut Corporate Social Responsibility) sebagai komponen dalam Laporan Keuangan Bank Syariah, yang diderivasi dari nilai-nilai Islam. Institusi Regulasi Internasional seperti AAOIFI (Accounting and Auditing of Islamic Financial Institution) dan Pemerintah di negara yang mayoritas Muslim seperti Malaysia telah memberikan dukungannya untuk mengembangkan mengadopsi standar Laporan Pertanggungjawaban Sosial ini (Sharani 2004; Yunus, 2004 dalam Farook dan Lanis, 2005).

Dari hasil studi literatur yang dilakukan oleh Finch (2005) dalam Anggraini (2006) menunjukkan bahwa motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan sosial lebih banyak dipengaruhi oleh usaha untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder mengenai kinerja manajemen dalam mencapai manfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Dalam Anggraini (2006) menyebutkan bahwa tuntutan terhadap perusahaan untuk memberikan informasi yang transparan, organisasi yang akuntabel, serta penerapan Corporate Governance yang bagus, semakin memaksa perusahaan untuk memberikan informasi mengenai aktivitas sosialnya. Masyarakat membutuhkan informasi mengenai sejauh mana perusahaan sudah melaksanakan aktivitas sosialnya sehingga hak masyarakat untuk hidup aman dan tentram serta kesejahteraan karyawan dapat terpenuhi. Oleh karena itu dalam perkembangannya sekarang ini akuntansi konvensional telah banyak dikritik karena tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat secara luas, sehingga kemudian muncul konsep akuntansi baru yang disebut sebagai Social Responsibility Accounting (SRA) atau Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial.

Penelitian sebelumnya Maali et al (2003) menggunakan sampel 29 Bank syariah di negaranegara Muslim. Hasilnya menunjukkan bahwa hanya sebelas bank (38%) yang pengungkapkan Laporan Pertanggungjawaban Sosialnya sesuai dengan standard yang ditetapkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution). Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa masih banyak Bank Syariah yang tidak mengungkapkan Laporan Pertanggungjawaban Sosialnya secara sempurna, yaitu sebanyak 62%. Kekurangan dalam penelitian ini adalah belum adanya analisis mengenai faktor-faktor berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Laporan Pertanggungjawaban Sosial di Bank Syariah.

Selanjutnya Farook dan Lanis (2005) mencoba untuk menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility pada 47 Bank Syariah yang ada di 14 negara di dunia. Kondisi Sosial Politik dan Corporate Governance adalah dua faktor yang coba diangkat dalam penelitian ini. Faktor Kondisi Sosial Politik ini terdiri dari tingkat kebebasan politik masyarakat serta proporsi masyarakat muslim, sedangkan faktor Corporate Governance terdiri dari Tata Kelola Islam (Islamic Governance) dan struktur kepemilikan saham IAH (Investment Account Holders Right). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh yang cukup besar dari faktor Kondisi Sosial Politik dan Corporte Governance terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility.

Berbeda dengan Farook dan Lanis (2005), hasil penelitian Kusumastuti (2006) yang melanjutkan penelitian Farook dan Lanis (2005), memperoleh hasil bahwa hanya ada satu sub variabel Corporate Governance, yaitu Islamic Governance, yang terhadap berpengaruh signifikan tingkat Corporate Social Responsibility. Pengungkapan Penelitian ini menggunakan studi kasus pada salah satu Bank Umum Syariah di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Kusumastusti menambahkan indikator manajemen risiko dalam sub variabel Islamic Governance sebagaimana disyaratkan dalam Code of Best Practice for Corporate Governance in Islamic Financial Institution.

Berdasarkan fakta mengenai lemahnya implementasi *Corporate Governance* dan pentingnya pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. terkait dengan peran sosial Bank Syariah serta berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu maka penulis mencoba untuk meneliti pengaruh *Corporate*

Governance terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah pengaruh mekanisme pengelolaan Islam (Islamic Governance) terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada Laporan Keuangan Tahunannya?
- 2. Bagaimanakah pengaruh proporsi IAH (Investment Account Holder) terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada Laporan Keuangan Tahunannya?

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Materi Penelitian

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah (2002: 1) disebutkan definisi Bank Syariah yaitu Bank yang berasaskan, antara lain, pada asas kemitraan, keadilan, trasparansi dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya disebutkan bahwa kegiatan Bank Syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain, sebagai berikut:

- 1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
- Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money)
- 3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas

- 4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang sifatnya spekulatif
- 5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Dalam Arifin (2003: 3) disebutkan bahwa sepanjang praktik Perbankan Konvensional tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam maka Bank Syariah dapat mengadopsi sistem dan prosedur perbankan yang ada. Tetapi apabila terjadi pertentangan dengan sistem syariah, maka Bank Syariah harus merencanakan dan menerapkan prosedur yang berbeda untuk menyesuaikan aktivitas perbankan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini didasarkan pada kesepakatan ulama mengenai hukum asal muamalat yang menyatakan bahwa "segala sesuatunya dibolehkan, kecuali yang ada larangannya dalam Al Qur'an dan Sunnah". Kesepakatan ulama ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad Shalallahu'Alaihi Wassalam yaitu "Antum a'lamu bi umuuri dunyakum" kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian (Karim, 2005: 8). Dengan demikian, Perbankan Syariah sebagai salah satu kegiatan muamalat ini akan selalu berkembang sesuai dengan perubahan waktu dan tempat. Karena visi Bank Syariah pada umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai dengan prinsip syariah (Wirdyaningsih et al, 2005: 17)

Jadi meskipun dalam praktiknya banyak sistem konvensional yang diadopsi oleh Bank Syariah namun prinsip utama Bank Syariah dalam menjalankan aktivitasnya adalah pada kesesuaian aktivitas perbankan dengan nilai-nilai syariah. Dalam Antonio (2001) disebutkan beberapa perbedaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional yang antara lain adalah:

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

	Bank Syariah		Bank Konvensional
1.	Melakukan investasi yang halal	1.	Tidak membedakan antara investasi haram dan halal
2.	Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa	2.	Memakai perangkat bunga
3.	Profit dan Falah (kemakmuran dunia dan kebahagiaan di akherat) oriented	3.	Profit oriented

- 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan
- Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah
- 4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk debitur-kreditur
- 5. Tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Antonio, Syafi'i (2001)

Akuntansi yang terkenal dengan "double entry book keeping" sebenarnya telah lama digunakan oleh umat Islam dalam percaturan perdagangan dan bisnis. Keterangan yang diberikan Dr. Ali Shawki Ismail Shehata seperti yang dikutip oleh Harahap (1997: 170), secara jelas menguatkan tentang keberadaan akuntansi dimasa ke-Islam-an.

Dalam Abdurrachman (2000) menyebutkan bahwa dalam perspektif Islam, akuntansi merupakan suatu proses pengembangan dari pencatatan kegiatan *muamalah*. Yang mana kegiatan *muamalah* ini lebih banyak terjadi dalam organisasi. Islam memandang bahwa akuntansi sebagai suatu catatan atas kegiatan *muamalah*, maka harus disajikan sejara jujur tanpa ada suatu pihak yang merasa dirugikan. Dalam firman Allah, keberadaan akuntansi dan fungsinya secara jelas di abadikan dalam surat Al Baqarah ayat 282.

Muhammad (2005) menyatakan bahwa dalam Surat Al Baqoroh ayat 282 ini tersirat tiga prinsip dasar yang universal dalam operasional akuntansi syariah. Ketiga prinsip dasar tersebut adalah:

1. Prinsip Pertanggungjawaban

Prinsip pertanggungjawaban atau akuntabilitas (Accountability) merupakan konsep yang tidak asing lagi di kalangan masyarakat muslim. Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim, persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Kholiq mulai dari alam kandungan. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai kholifah di muka bumi. Manusia dibebani amanah oleh Allah untuk menjalankan fungsi-fungsi kekholifahannya. Inti kekholifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah.

2. Prinsip Keadilan

Jika ditafsirkan lebih lanjut maka ayat 282 surat Al Baqoroh mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Dalam konteks akuntansi menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al Baqoroh, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran ini sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh misalnya, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran, dan pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandasi pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi ekonomi.

Organization for Economic Corporation and Development (OECD, 2004)) telah mengembangkan seperangkat prinsip Corporate Governance yang diterapkan sesuai dengan kondisi di berbagai negara. Prinsip dasar tersebut adalah Transaparansi (fransparency), Akuntabilitas (accountability), Kewajaran (fairness) dan Responsibilitas (responsibility) yang mencakup lima aspek yaitu: perlindungan hak-hak pemegang saham, perlakuan adil terhadap seluruh pemegang saham, peranan stakeholder dalam Corporate Governance, keterbukaan dan transparansi, dan peranan Board of Directors dalam perusahaan.

Dalam Perbankan Syariah, persoalan governance berbeda dengan governance dalam bank kovensional karena perbankan Islam mempunyai kewajiban untuk menaati seperangkat peraturan yang berbeda-beda, yaitu hukum Islam (Syariat) dan pada umumnya mengikuti harapan kaum muslim dengan memberikan modal kemitraan berdasarkan aransemen Profit and Loss Sharing (PLS) atau caracara pembiayaan lain yang dibenarkan oleh syariah (Lewis et al, 2004: 235-236).

Nienhaus (2003) menyebutkan bahwa pendukung pendekatan *Islamic Corporate Governance* menekankan bahwa *Corporate Governance* harus berorientasi pada nilai serta mengembangkan kewajaran dan keadilan dengan memperhatikan seluruh *stakeholder* perusahaan.

Menurut Lewis *et al* (2004: 243) yang pokok dalam kerangka *Corporate Governance* untuk sebuah Bank Syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan kontrol internal yang mendukungnya. DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada Bank Syariah, Unit Usaha Syariah maupun institusi keuangan syariah lainnya. Anggota DPS harus terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan umum di bidang perbankan. Persyaratan anggota ditetapkan oleh DSN. (Arifin, 2003: 115). Di Indonesia, DSN sendiri merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai Syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. Kewenangan dari DSN sendiri adalah mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa tersebut oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia melalui DPS (Arifin, 2003:116).

Corporate Social Resposibility (CSR) adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintegrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholders, yang melebihi tanggung jawab organisasi di bidang hukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini, 2006). Menurut Schermerhorn (1996) dalam Muhammad (2004: 136) Corporate Social Resposibility diartika sebagai kewajibvan organisasi untuk berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingan sendiri maupun kepentingan stakeholder

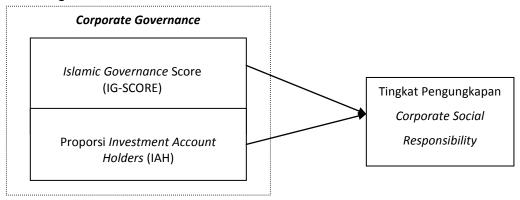
Manusia Sebagai Khalifatullah Fill Ardh, konsekuensi dari predikat Khalifatullah Fill Ardh adalah bahwa manusia dalam seluruh masa hidupnya harus bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pemberi amanah yaitu Allah SWT. Khalifah adalah konsepsi yang sangat fundamental dalam Islam yang menunjukkan kepercayaan muslim bahwa Allah SWT membentuk atau melahirkan manusia untuk beribadah kepada-Nya sebagai seorang pewaris dan pemelihara dunia (Zaid dan Tibbits, 1999, 1, dalam Abdurrachman, 2000).

Pemahaman hakekat diri tentang predikat khalifah dengan melibatkan akal dan hati nuraninya merupakan hal yang vital bagi diri manusia karena secara langsung akan mempengaruhi segala tujuan hidup manusia itu sendiri. Bila manusia dapat mencapai dan menemukan hakekat dirinya maka ia dapat menggunakan konsep *Khalifatullah Fill Ardh* sebagai perspektif dalam melihat dan membangun realitas-realitas yang ada dalam kehidupan (Triyuwono, 1996, 58; Saddiqi, 1991, 39, dalam Abdurrachman, 2000). Bertitik tolak dari predikat khalifah yang diemban manusia maka tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah atau menyembah kepada Allah SWT.

Dalam Islam, hak dan kewajiban individu dan organisasi dengan tetap menjunjung penghargaan kepada orang lain, telah didefinisikan dengan jelas (Maali et al 2003). Selanjutnya Maali et al (2003) menjelaskan bahwa hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki dasar yang lebih efektif dalam hal nilai-nilai etika. Dalam Islam pertanggungjawaban didefinisikan dengan baik dan tidak berubah sepanjang waktu serta tidak dipengaruhi oleh kerangka teori yang berbeda-beda. Hal ini membuat definisi dari pertanggungjawaban bersifat stabil. Karena Islam merupakan sebuah agama yang relevan untuk setiap waktu dan tempat.

Berdasarkan konsep ini setiap muslim harus mempertanggungjawabkan kepada Allah segala sesuatu yang dilakukannya. Baydon and Willet (1997) dalam Maali et al (2003) menyatakan bahwa konsep Tauhid ini memberikan perkembangan pada konsep lebih pertanggungjawaban. yang luas dari Pertanggungjawaban kepada Allah mempengaruhi pertanggungjawaban kepada masyarakat. Setiap umat Islam harus mengakui adanya hak Allah dan hak-hak orang lain. Hubungan umat Islam dengan sesamanya dan dengan masyarakat pada umumnya sangat ditekankan dalam Al Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pada perintah Allah meliputi pengakuan terhadap hak-hak orang lain dan perlakuan yang adil terhadap masyarakat. Maka pertanggungjawaban kepada Allah meliputi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

2.2 Kerangka Pemikiran



- H₁: Ada pengaruh positif yang signifikan antara mekanisme pengelolaan Islam (Islamic Governance) yang ada dengan tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada Laporan Keuangan Tahunannya.
 - H₂: Ada pengaruh positif yang signifikan antara proporsi IAH (Investment Account Holder) terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada Laporan Keuangan Tahunannya.

2.3 Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganlaisi pengaruh Corporate Governance terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Islam Malaysia Berhad, sehingga perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis-hipotesis yang diajukan dengan cara mengukur variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan variabel Corporate Governance sebagai variabel independen dan tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai variabel dependen, serta menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

Adapun jenis data yang digunakan dalam pelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Laporan Keuangan Tahunan Bank Islam Malaysia Berhad yang dipublikasikan. Laporan Keuangan ini digunakan untuk mengetahui banyaknya item Pengungkapan Corporate Social Responsibility, Islamic Governance Score dan proporsi Investment Account Holder.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumenter. Data diperoleh dengan mengakses alamat website Bank Islam Malaysia Berhad yaitu www.bankislam.com.my. Data yang diambil dari situs ini hanya data yang berupa Annual Report BIMB dari tahun awal berdiri sampai tahun terbaru.

2.3.1 Metode Analisis

2.3.1.1 Uji Normalitas Data

Uji Normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi antara variabel dependen dengan variabel independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik) pada normal *p-plot of Regression standardizzed residual* dari variabel independen, dimana:

- Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas
- 2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas,

2.3.1.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis Regresi berganda (*Multiple Regression*) dengan alasan bahwa variable independennya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk menentukan hubungan antara tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dengan variabel-variabel Independen. Persamaan Regresinya adalah sebagai berikut :

CSRD = $\alpha + \beta_1$ IG-SCORE+ β_2 IAH+ β_3 SIZE+e

Dimana:

CSRD = tingkat Pengungkapan Corporate

Social Responsibility

 β_1 = Koefisien Regresi *Corporate*

Governance

IG-SCORE = (DPS + NUM + PHD+MRISK)

DPS = Variabel dummy, 1 untuk

Bank Syariah yang memiliki

Bank Syariah yang memiliki DPS, 0 untuk yang lainnya

NUM = Variabel dummy, 1 untuk Bank Syariah dengan 3 atau

lebih anggota DPS, 0 untuk lainnya

PHD = Variabel dummy, 1 untuk

Bank Syariah dengan 1 atau lebih anggota DPS yang memiliki pendidikan Doktor, 0 untuk yang

lainnya.

MRISK = Variabel dummy, 1 untuk

Bank Syariah dengan

manajemen resiko, 0 untuk lainnya

 β_2 = Koefisien Regresi Proporsi

IAH

IAH = Proporsi IAH (Invesment

Account Holder) terhadap

paid-up capital

Variabel Kontrol

SIZE = Natural Log total Asset

Perusahaan

 β_3 = Koefisien Regresi Size

e = Standar error

Kemudian untuk mengetahui pengaruh antara Corporate Governance terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility maka dilakukan pengujian-pengujian hipotesis penelitian terhadap variabel-variabel dengan uji f dan uji t. Dalam penelitian ini α ditentukan sebesar 5%.

2.3.1.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel independen saling berhubungan secara linier. Multikolinearitas terjadi apabila antara variabel-variabel independen terdapat hubungan yang signifikan. Untuk mendeteksi adanya masalah multikolinearitas adalah dengan memperhatikan:

- Besaran korelasi antar variabel independen.
 Pedoman suatu model regresi bebas
 multikolineritas, memiliki kriteria sebagai
 berikut:
 - Koefisien Korelasi antar variabel-variabel independen harus lemah tidak lebih besar dari 90 % (dibawah 0,9)
 - b. Jika korelasi kuat antara variabel-variabel Independen dengan variabel independen lainnya yaitu korelasi diatas 90 % (0,9), maka hal ini menunjukkan terjadinya multikolinearitas yang serius
- 2. Nilai tolerance dan VIF yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi. Persamaan yang digunakan

adalah: VIF =
$$\frac{1}{\text{Tolerance}}$$

Nilai *cutoff* yang dipakai untuk menandai adanya faktor-faktor multikolinearitas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 5. Model regresi yang baik tidak terdapat masalah multikolinearitas atau adanya hubungan korelasi diantara variabel-variabel independennya.

Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah terjadinya varians yang tidak sama untuk variabel independen yang berbeda. Heterokedastisitas dapat terdeteksi dengan melihat plot antara nilai taksiran dengan residual. Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas adalah dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatter plot. Yang mendasari dalam pengambilan keputusan adalah:

- Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk satu pola yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit) maka akan terjadi masalah heterokedastisitas.
- 2. Jika tidak ada pola jelas seperti titik-titik yang menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu-sumbu, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan

kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya), uji autokorelasi dapat dilakukan dengan cara:

Asumsi Autokorelasi diuji dengan uji Durbin-Watson (DW)

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi berdasarkan:

- a. Bila nilai DW lebih rendah dari batas bawah (lower bound, L), maka koefisien korelasi lebih besar dari nol yang berarti ada masalah autokorelasi positif.
- Bila nilai DW lebih besar dari batas atas (upper bound, U), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol yang berarti tidak ada autokorelasi positif.
- Bila nilai DW terletak diantara batas atas dan batas bawah maka tidak dapat disimpulkan.

Berdasarkan tabel Statistik *Dubin-Watson* untuk taraf kepercayaan 95% dengan N= 23, dan jumlah variabel Independen= 2, maka pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

- a. Bila nilai DW lebih rendah dari 1,17 maka koefisien korelasi lebih besar dari nol yang berarti ada masalah autokorelasi.
- Bila nilai DW lebih besar dari 1.54, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol yang berarti tidak ada autokorelasi.

c. Bila nilai DW terletak diantara 1,54 dan 1,17 maka tidak dapat disimpulkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

3.1 Hasil Penelitian

Hasil atau output dari analisis regresi dengan menggunakan SPSS 12 yang terlihat dalam Tabel 3.1 berikut, maka dapat disusun sebuah persamaan regresi ganda sebagai berikut:

Y = -0,829 + 0,038 IG Score + 0,002 IAH + 0,045 Size

Y merupakan variabel dependen yang menunjukkan tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*, sedangkan variabel bebas dalam persamaan regresi tersebut adalah X₁ yang menerangkan IG SCORE dan X₂ yang menerangkan proporsi IAH, serta variabel kontrol berupa SIZE (ukuran perusahaan).

Tabel 3.1

Koefisien Regresi, t hitung dan Tingkat Signifikansi Variabel Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized t Coefficients		Sig.
	B Std. Error		Beta		
1 (Constant)	829	.086		-9.639	.000
IG-SCORE	.038	.012	.259	3.233	.004
IAH	002	.001	168	-2.091	.050
SIZE	.045	.005	.874	9.248	.000

a Dependent Variable: Y

(Sumber: Data Setelah Diolah dengan SPSS)

Uji F

Uji F bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh secara bersama-sama antara variabelvariabel independen (IG SCORE, Proporsi IAH dan Size sebagai variabel kontrol) terhadap variabel dependen (tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*). Uji F dilakukan dengan membandingkan besarnya F_{hitung} dengan F_{tabel} atau

dapat pula dilakukan dengan melihat probabilitasnya. Apabila F_{hitung} lebih besar daripada F_{tabel} maka semua variabel independen berpengaruh secara bersamasama terhadap variabel dependen. Sedangkan pengujian dengan nilai probabilitas yaitu apabila probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi (5%) maka model diterima. Besarnya F hitung ataupun

probabilitasnya dapat dilihat dalam tabel ANOVA pada tabel 3.2.

Berdasarkan hasil perhitungan melalui program SPSS 12.00 diperoleh F_{hitung} sebesar 77,614 lebih besar dari F_{tabel} sebesar 3,49 sehingga dapat disimpulkan bahwa IG SCORE, Proporsi IAH dan Size sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau dengan kata lain secara simultan variabel

independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Sedangkan dengan melihat nilai probabilitasnya yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari nilai 5% maka dapat ditarik kesimpulan bahwa IG SCORE, Proporsi IAH dan Size sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* atau dengan kata lain secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 3.2 Nilai F hitung dan Taraf Signifikansi

ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression		.066	3	.022	77.614	.000(a)
	Residual	.005	19	.000		
	Total	.071	22			

a Predictors: (Constant), Size, IG-SCORE, IAH

b Dependent Variable: CSRD

(Sumber: Data Setelah Diolah dengan SPSS)

Uji t

Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen digunakan uji t. Keputusan dalam uji t dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} atau dapat pula dilihat melalui nilai probabilitasnya.

Kaidah Pengambilan keputusan :

- 1. Berdasarkan t hitung 3
 - a. Apabila t tabel < t hitung < t tabel maka
 Hipotesis ditolak
 - Apabila t hitung < t tabel atau t hitung > t tabel maka Hipotesis diterima
- 2. Berdasarkan Probabilitas
 - a. Apabila probabilitas > 5% maka Hipotesis ditolak.
 - b. Apabila probabilitas < 5% maka Hipotesis diterima

Dengan menggunakan SPSS versi 12.00 dapat dilakukan pengujian terhadap koefisisen regresi sehingga dapat diketahui nilai t hitung maupun nilai probabilitasnya (p-value). Berdasarkan analisis

regresi melalui program SPSS (tabel 3.1) dapat ditarik kesimpulan bahwa secara parsial variabel independen yaitu bahwa IG SCORE dan Size sebagai variabel kontrol berpengaruh terhadap tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSRD). Sedangkan IAH tidak berpengaruh pada tingkat Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSRD).

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi untuk mengukur proporsi variasi dalam variabel tidak bebas yang dijelaskan oleh regresi. Berdasarkan hasil olah data dengan menggunakan SPSS 12.00 seperti yang terlihat pada Tabel 3.3 dibawah maka nilai R² adalah 0,925. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility* 92,5% dapat dijelaskan oleh variabel IG SCORE dan IAH serta variabel kontrol SIZE. Sedangkan sisanya 7,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 3.3

Koefisien Determinasi (R²) Variabel Independen

Model Summary(b)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	
1	.962(a)	.925	.913	.01684	

a Predictors: Constant), Size, IG-SCORE, IAH

b Dependent Variable: CSRD

(Sumber: Data Setelah Diolah dengan SPSS)

3.1.2 Uji Asumsi Klasik Uji Multikolinearitas

Berdasarkan perhitungan SPSS 12.00 dalam Tabel 3.4 dibawah, diperoleh nilai VIF diatas nilai tolerance 0, 1 dan dibawah 5, yaitu sebesar 1,612 untuk IG-SCORE,

1,617 untuk IAH dan 2,250 untuk Size sebagi variabel kontrol. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinearitas.

Tabel 3.4

Collinearity Statistics

Coefficients(a)

Model		Correlations	Collinearity Statistics		
	Zero-order Partial Part		Tolerance	VIF	
1 (Constant)					
IG-SCORE	.735	.596	.204	.620	1.612
IAH	.468	433	132	.618	1.617
SIZE	.930	.905	.583	.444	2.250

a Dependent Variable: Y

(Sumber: Data Setelah Diolah dengan SPSS)

Uji Heterokedastisitas

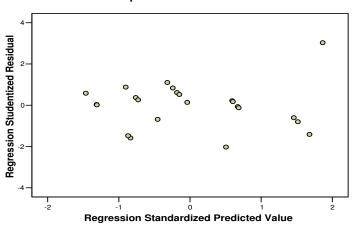
Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap pola

scatter plot yang dihasilkan melalui SPSS. Grafik scatter plot tampak pada Gambar Grafik 3.2 di bawah ini:

Gambar 3.2 Grafik Scatter plot

Scatterplot

Dependent Variable: Y



(Sumber: Data Setelah Diolah dengan SPSS)

Dari gambar Grafik diatas tampak bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak menunjukkan pola tertentu. Titik-titik tersebut menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi tidak mengandung gejala heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Berdasarkan tabel Statistik Dubin-Watson untuk taraf kepercayaan 95% dengan N= 23, dan jumlah variabel Independen= 2, maka pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah:

- d. Bila nilai DW lebih rendah dari 1,17 maka koefisien korelasi lebih besar dari nol yang berarti ada masalah autokorelasi.
- e. Bila nilai DW lebih besar dari 1.54, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol yang berarti tidak ada autokorelasi.
- f. Bila nilai DW terletak diantara 1,54 dan 1,17 maka tidak dapat disimpulkan.

Dengan kriteria diatas maka jika dilihat dari Tabel 3.5 dibawah yang menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,706, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi Autokorelasi.

Tabel 3.5 **Durbin-Watson**

Model Summary(b)		
Change Statistics		

		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					
Model		Change Statistics					
	R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change		
1	.925	77.614	3	19	.000	1.706	

a Predictors: (Constant), Size, IG-SCORE, IAH

b Dependent Variable: CSRD

(Sumber: Data Setelah Diolah dengan SPSS)

3.2 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen adalah IG-SCORE. Sedangkan variabel IAH tidak berpengaruh secara signifikan. Hasil yang diperoleh berdasarkan berbagai pengujian yang telah dilakukan adalah:

3.2.1 Statistik Deskriptif

Dari pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa rata-rata tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Bank Islam Malaysia Berhad sebesar 25% dari tingkat pengungkapan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jika dibandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yaitu pada penelitian Maali, et al (2003) sebesar 13,3%, dan pada penelitian Farook dan Lanis (2005) sebesar 16,8%. Mungkin hal ini disebabkan karena data yang digunakan adalah jenis data time series sehingga tingkat pengungkapan dari tahun ke tahun hampir sama. Selain itu berdasarkan jumlah data dari tahun ke tahun dapat diambil kesimpulan bahwa Bank Islam Malaysia Berhad termasuk salah satu Bank Syariah yang memiliki tingkat pengungkapan yang bagus. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility yang cukup bagus pada awal pendiriannya tahun 1983, yaitu sebesar 18%. Tingkat pengungkapan tertinggi dari tahun ke tahun adalah sebesar 39% yaitu pada tahun 2006. Bagusnya tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility di Malaysia juga tidak terlepas dari kondisi sosial mayarakatnya yang telah menerapkan nilai-nilai Islam dalam setiap sendi kehidupan. Maka konsep yang terkandung dalam Corporate Social Responsibility juga telah menjadi budaya dalam masyarakat yang menerapkan konsep Islam dalam kehidupannya.

Selain itu, uji korelasi Pearson Parametric mengindikasikan bahwa tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility memiliki hubungan yang signifikan dengan Islamic Governance Score (IGSCORE), Investment Account Holder (IAH), dan Ukuran Perusahaan (SIZE). Ukuran Perusahaan (SIZE) juga berpengaruh terhadap Islamic Governance Score (IGSCORE) dan Investment Account Holder (IAH). Hal ini sejalan dengan sejumlah teori. Teori Agensi dan Teori Akuntansi Positif menyatakan bahwa manajer menggunakan pengungkapan Corporate Social Responsibility sebagai bagian dari strategi untuk mengurangi Agency Cost dan sebagai bagian dari

political cost (Watt dan Zimmerman, 1978 dalam Farok dan Lanis, 2005). Perusahaan yang lebih besar akan mengungkapkan informasi yang lebih lengkap (Farok dan Lanis, 2005). Teori Legitimasi juga mengindikasikan bahwa pengungkapan sosial dibutuhkan untuk melegitimasi keberadaan sebuah perusahan kepada masyarakat yang relevan.

3.2.2 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis yang dilakukan dengan Analisis Regresi Berganda diatas menunjukkan bahwa:

1. Hipotesis pertama (H1) dapat diterima.

Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa Corporate Governance yang diukur melalui Islamic Governance Score (IG-SCORE) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility. Hasil penelitian menunjukkan konsistensi dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa Islamic Governance Score (IG-SCORE) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Farook dan Lanis, 2005, Kusumastuti, 2006).

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi kepatuhan Bank Islam Malaysia Berhad dalam mewujudkan Islamic Governance yang dalam hal ini adalah Dewan Pengawas Syariah dan adanya manajemen risiko maka tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility juga akan semakin besar. Hal ini mendukung hipotesis pertama yang berbunyi "Ada pengaruh positif yang signifikan antara mekanisme pengelolaan Islam (Islamic Governance) yang ada dengan tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada Laporan Keuangan Tahunannya" yang berarti Hipotesis pertama (H1) dapat diterima.

2. Hipotesis kedua (H2) tidak dapat diterima.

Berbeda dengan Islamic Governance Score, dari hasil analisis yang dilakukan Corporate Governance yang diukur melalui proporsi Investment Account Holder (IAH) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Hasil penelitian ini menunjukkan konsistensi dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa IAH tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Farook dan Lanis, 2005, Kusumastuti, 2006).

Selain itu dari pengujian regresi dapat diketahui bahwa Variabel Kontrol berupa ukuran perusahaan (SIZE) memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility. Hal ini menunjukkan inkonsistensi dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan secara statistik (Farok dan Lanis, 2005), sedangkan dalam penelitian Kusumastuti (2006) variabel ini akhirnya dikeluarkan dari model regresi karena menyebabkan multikolinieritas. Dalam penelitian Farok dan Lanis (2005) disebutkan bahwa adanya pengaruh yang tidak signifikan antara ukuran perusahaan terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility disebabkan karena penelitian dilakukan dengan data cross section sehingga log natural terhadap Total Asset bukan ukuran relatif yang dapat mengakomodir perbedaan ukuran relatif Total Aset diantara negara yang berbeda (Farook dan Lanis, 2005).

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil analisis dan pengujian hipotesis, dapat ditarik kesimpulan:

- Islamic Governance memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility yang disajikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad pada Laporan Keuangan Tahunannya.
- Proporsi IAH (Investment Account Holder)
 memiliki pengaruh negatif yang tidak
 signifikan terhadap tingkat Pengungkapan
 Corporate Social Responsibility yang
 disajikan oleh Bank Islam Malaysia Berhad
 pada Laporan Keuangan Tahunannya.
- Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya (Farook dan Lanis, 2005) yang menyatakan bahwa *Islamic Governance* dan proporsi IAH berpengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat

- Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* yang disajikan.
- 4. Variabel kontrol berupa ukuran perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini juga memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility, hal juga menunjukkan inkonsistensi dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Farook dan Lanis, 2005)
- 5. Dari hasil analisis mengenai kondisi sosial masyarakat Malaysia dapat diambil kesimpulan bahwa kondisi sosial masyarakat juga mempengaruhi besarnya tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa akuntansi bukanlah sebuah ilmu yang *value free*.

KETERBATASAN

Keterbatasan dari penelitian ini adalah:

 Sampel penelitian hanya pada satu Bank Syariah sehingga tidak bisa digeneralisasi hasilnya.

SARAN

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan terkait dengna penelitian ini adalah:

- Penelitian selanjutnya dilakukan dengan memperluas sampel penelitian dengan menambah sampel bank yang diteliti
- Penelitian berikutnya dapat menambah variabel yang mempengaruhi tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah, sehingga dapat diketahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi tingkat Pengungkapan Corporate Social Responsibility di Bank Syariah.
- 3. Penelitian ini dapat diaplikasikan pada Institusi-Institusi Islam non-Perbankan yang sudah mulai berkembang akhir-akhir ini, dengan melakukan beberapa penyesuaian terhadap indikator-indikator yang dijadikan pengukuran variabel-variabelnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 1998. Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institution. Bahrain.
- Abdurrahman, Yusuf. 2000. **Dekonstruksi Nilai-Nilai Agency Theory dengan Nilai-Nilai Syariah; Suatu Upaya Membangun Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Bernafaskan Islam**. Skripsi
 Universitas Brawijaya: Malang.
- Aliminsyah. 2003. *Kamus Istilah Akuntansi*. Yrama Widya: Bandung.
- Al Qur'an dan Terjemahannya. PT Syaamil Cipta Media: Bandung.
- Anggraini, Fr.Rani Retno. 2006. Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahn yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta). Simposium Nasional Akuntansi: Padang.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah:*Dari Teori ke Praktik. Gema Insani Press:
 Jakarta.
- Arifin, Zainal. 2003. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Alvabet: Jakarta.
- Bank Islam Malaysia Berhad. *Annual Report 2006*. www.bankislam.com.my. diakses tanggal 25 Februari 2007.
- Djalil, Sofyan A. 2001. *Hukum Perusahan dan Kepailitan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Jakarta.
- Dusuki, Asyraf Wajdi dan Humayon Dar. 2005, Stakeholders' Perceptions of Corporate Social Responsibility of Islamic Banks:

 Evidence from Malaysian Economy.

 www.google.com diakses tanggal 14 Januari 2007.
- Farook, Sayd dan Roman Lanis. 2005. Banking on Islam? Determinants of Corporate Social Responsibility Disclosure.

 www.islamic accounting.com. diakses tanggal 7 September 2006.

- Gunarsih, Tri. 2003. Struktur Kepemilikan Sebagai Salah Satu Mekanisme Corporate Governance. *Jurnal Kompak* Nomor 8, Mei-Agustus 2003, hal: 155-172.
- Harahap, Sofyan Syafri. 1997. *Akuntansi Islam*. Bumi Aksara: Jakarta
- _____.2001. *Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam*. Pustaka Quantum: Jakarta
- _____.2005. *Teori Akuntansi*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- IAI. 2002. **Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah**.
 Jakarta.
- Isgiyarta, Jaka dan Nila Tristiarini. 2005. Pengaruh Penerapan Prinsip Corporate Governance terhadap Abnormal Return pada saat Pengumuman Laporan Keuangan. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi* Vol. 12 No. 2, September.
- Jensen, Michael C. Dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Manajerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal* of Financial Economics 3, 305-360.
- Karim, Adiwarman. 2005. *Islamic Banking, Fiqh and Financial Analysis.* PJ Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Kusumastuti, Ratih. 2006. Pengaruh Kondisi Sosial Politik dan Corporate Governance terhadap Pengungkapn Laporan Pertanggungjawabn Social di Bank Syariah, Kasus PT Bank Muamalat Indonesia. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang.
- Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Agaoud. 2004. *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Serambi: Jakarta.
- MASB. 2004. Financial Reporting Standard *i-*1 2004. <u>www.masb.my</u>. Diakses tanggal 1 Juli 2007-07-05.
- Muamalat, Bank. 2004. *Laporan Tahunan 2004*Muhammad. 2005. *Pengantar Akuntansi Syariah*.
 Salemba Empat: Jakarta.
- Muhammad. 2004. *Etika Bisnis Islami*. UPP AMP YKPN: Yogyakarta.

- Mutmainah, Siti. 2005. *Studi tentang Islamic Value Disclosures dalam Pelaporan Keuangan Bank Syariah.* Laporan Akhir Research Grant Jurusan Akuntansi Universitas Diponegoro: Semarang.
- Maali, Basam, Peter Casson dan Christopher Napier. 2003. *Social Reporting by Islamic Banking.* www.islamic_accounting.com. diakses tanggal 7 September 2006.
- Nienhaus, Volker. 2003. *Corporate Governance in Islamic Banks*. International Conference on Islamic Banking: Risk Management, Regulation and Supervision.
- Parlimin Malaysia. 2007. *Struktur Parlimin*. www.parlimin.gov.my. Diakses tanggal 1 Juli 2007-07-05.
- Republika. 2004. *Bank Syariah Butuh GCG Khusus*. Artikel Tanggal 24 Juni 2004. www.syariahmandiri.co.id. diakses tanggal 7 Januari 2007.
- Ridwan, Muhammad. 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. UII Press: Yogyakarta.
- Riyanto, Bambang LS dan Dwi Novi Kusumawati. 2006. Transparency and Corporate Governance: Analysis of Factor Affecting Transparency and Its Effect on Market Value of The Firm. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol. 9, No. 2, Mei.
- Suprayitno. 2004. Komitmen Menegakkan Good
 Corporate Governance, Praktik Terbaik
 Penerapan GCG Perusahaan di Indonesia. The
 Indonesian Institute of Corporate Governance:
 Jakarta.
- Wirdyaningsih, Karnaen Perwaatmaja, Gemala Dewi, Yeni Salma Barlinti. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Kencana: Jakarta